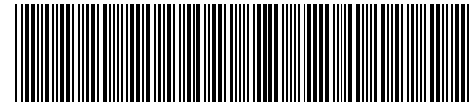




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099137/2023**



DS:2157-9125-7373-6680

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
4. Kode/Nama Satker : (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
- Sebesar : Rp. 130.500.000 (SERATUS TIGA PULUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 130.500.000
Rp. 130.500.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	130.500.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BOJONEGORO (073) Rp. 130.500.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2157-9125-7373-6680

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				130.500.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum				130.500.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Tata Kelola Administrasi Peradilan umum yang di susun				
		2. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum				
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum				
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara				
		5. 02	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu				
		6. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan				
		7. 03	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi	6,00	kegiatan		1.500.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Percepatan Penyelesaian Perkara	6,00	kegiatan		1.500.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	250,00	Perkara, Berkas Perkara		105.000.000
Rincian Output	:	01	BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	250,00	Perkara		105.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	170,00	Orang		24.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	170,00	Orang		24.000.000

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2023

I B. SUMBER DANA



DS:2157-9125-7373-6680

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Halaman : I B. 1

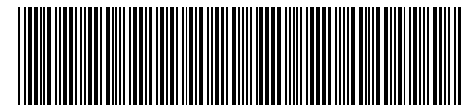
				Pagu			Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	130.500.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	130.500.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2157-9125-7373-6680

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099137	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN	-	130.500	-	-	-	130.500		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	130.500	-	-	-	130.500		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	130.500	-	-	-	130.500		
1049.AEA	Koordinasi (05.29 JAWA TIMUR / KAB. LAMONGAN)	-	1.500	-	-	-	1.500	05 . 29	
01	RM	-	1.500	-	-	-	1.500	073	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (05.29 JAWA TIMUR / KAB. LAMONGAN)	-	105.000	-	-	-	105.000	05 . 29	
01	RM	-	105.000	-	-	-	105.000	073	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (05.29 JAWA TIMUR / KAB. LAMONGAN)	-	24.000	-	-	-	24.000	05 . 29	
01	RM	-	24.000	-	-	-	24.000	073	
JUMLAH		-	130.500	-	-	-	130.500		

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2157-9125-7373-6680

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (099137) PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

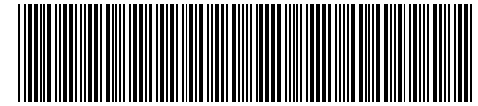
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099137	PENGADILAN NEGERI LAMONGAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.941	130.500
		BELANJA BARANG	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.941	130.500
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.941	130.500
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.869	10.941	130.500
		PERKIRAAN PENERIMAAN	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.155	2.157	25.862
		- PNBP (425232)	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	171	2.030
		- PNBP (425233)	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	9.300
		- PNBP (425239)	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211	14.532

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2023
IV A. B L O K I R**



DS:2157-9125-7373-6680

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [099137] PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

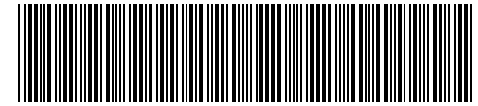
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099137/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:2157-9125-7373-6680

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [099137] PENGADILAN NEGERI LAMONGAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002